



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(IV), (VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023

1. Hasrul Buamona
2. Siti Badriyah
3. Harseto Setyadi Rajah
4. Jati Puji Santoso
5. Syaloom Mega G. Matitaputty
6. Ananda Luthfia Rahmadhani
7. Wendra Yunaldi
8. Muhammad Saleh
9. DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) diwakili Abda Khair Mufti (Ketua Umum) dan Muhammad Hafidz (Sekretaris Umum)

PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) diwakili Elly Rosita Silaban (Presiden Dewan Eksekutif) dan Dedi Hardianto (Sekretaris Jenderal)

PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum)

2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Wiwit Widuri (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum)
3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum)
4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Arif Minardi (Ketua Umum) dan Idrus (Sekretaris Umum)
5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan (Sekretaris Umum)
6. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie (Sekretaris Jenderal)
7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum)
8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, diwakili Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal)
9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal)
10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal)
11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal)
12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal)
13. Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, diwakili Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris)

PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023

1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum)
2. Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI) diwakili Indra Munaswar (Ketua Umum)
3. Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98) diwakili Abdul Hakim (Ketua Umum)
4. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP Pariwisata Reformasi) diwakili Sofyan Bin Abd Latief (Ketua Umum)
5. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat, diwakili oleh Dwi Hantoro Sutomo (Ketua) dan Andy Wijaya (Sekretaris I)
6. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP) diwakili oleh Sunandar (Ketua Umum)

7. Serikat Pekerja Aqua Pekerja Aqua Group (SPAG) diwakili oleh Zulkarnaen (Ketua Umum)
8. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) diwakili oleh Muhammad Abrar Ali (Ketua Umum) dan Bintoro Suryo Sudibyo (Sekretaris Jenderal)
9. Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) diwakili oleh Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba (Ketua Umum) dan T. Putri Kawistari (Sekretaris Jenderal)
10. Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) diwakili oleh Agus Wibawa (Ketua Umum) dan Ide Bagus Hapsara (Sekretaris Jenderal)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV), (VI)

Kamis, 6 April 2023, Pukul 11.17 – 11.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:**

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:

1. Saut Pangaribuan
2. Harris Manalu
3. Parulian Sianturi
4. Abdullah Sani
5. Haris Isbandi
6. Supardi
7. Nikasi Br. Ginting

C. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023:

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Achmad Ismail
3. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
4. Wahidin
5. Sunarti

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023:

1. Muhammad Raziv Barokah
2. Caisa Aamuliadiga
3. Bagus Santoso
4. Harimuddin
5. Muhtadin

E. Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023:

1. Abdul Hakim
2. Sofyan Bin Abd Latief
3. R. Abdullah

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023:

1. Ari Lazuardi
2. Endang Rokhani
3. Mustiyah
4. Sahat Butar Butar

G. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Budi Setiawati | (Kemensetneg) |
| 5. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 6. Mochamad Muafi | (Kemensetneg) |
| 7. Oryza Trivia | (Kemensetneg) |
| 8. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 9. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 10. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 11. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 12. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 13. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 14. Christian | (Kemenkeu) |
| 15. Bagus Anandoyo Basuki | (Kemenkeu) |
| 16. Dessy Pratiwi K. | (Kemenkeu) |
| 17. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 18. As'ad Adi Nugroho | (Kemenag) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:13]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini ada 4 perkara yang akan disidangkan, yaitu Perkara Nomor 5 Tahun 2023 yang diajukan oleh Pak Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Yang kedua, Perkara Nomor 6 Tahun 2023 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Yang ketiga, Perkara Nomor 14 Tahun 2023 yang diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional. Kemudian, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, lalu Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, lalu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kemudian Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan terakhir, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang terakhir ini diwakili oleh Bapak Mohammad Jumhur Hidayat dan kawan.

Kemudian, perkara selanjutnya, yaitu Perkara Nomor 22 Tahun 2023 diajukan oleh R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian, ada juga beberapa pemohon lainnya, misalnya DPN FSPI, PP PPMI '98, kemudian DPP FSP Pariwisata Reformasi, dan kawan-kawan. Jadi, itu ada empat perkara.

Kemudian untuk diketahui dan mungkin kita sudah tahu bersama bahwa dari keempat perkara ini terkait dengan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang tadinya perppu, kemudian perppu tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPR dan sudah menjadi undang-undang.

Oleh karena itu, untuk Perkara Nomor 6 telah mencabut permohonannya karena sudah kehilangan objek.

Nah, untuk ketiga perkara yang lain, yaitu Nomor 5, Nomor 14, dan Nomor 22 perlu kami konfirmasi dari Para Pemohon. Apakah akan mencabut seperti Perkara Nomor 6 atau bagaimana? Atau terus? Bagaimana?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:45]

Izin, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 5, prinsipnya kami menunggu putusan karena kami menginginkan adanya pandangan dari Mahkamah Konstitusi. Dan juga kami mungkin mengusulkan agar menjadi perhatian terkait dengan hukum acara perppu agar bisa lebih dikhususkan, dipercepat, Yang Mulia (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN [05:02]

Ya (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:03]

Agar ... karena objeknya berbeda dengan undang-undang. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [05:05]

Ya, baik. Terima kasih.
Kemudian, Nomor 14?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023: M RAZIV BAROKAH [01:12]

Yang Mulia, untuk kami Perkara Nomor 16, kami tetap melanjutkan ... Nomor 14, mohon maaf, kami tetap melanjutkan perkara ini, Yang Mulia. Karena tentu kami memiliki argumentasi yang berbeda mengenai perppu ini yang ditetapkan menjadi undang-undang. Menurut kami, kehilangan objek itu harus diiringi dengan kehilangan masalah yang dimohonkan, Yang Mulia. Apabila objek ini dinyatakan hilang tapi masalahnya masih ada, ini sebetulnya tidak kehilangan objek, tapi mengaburkan objek, Yang Mulia. Jadi, kami tetap ingin perkara ini disidangkan dan sampai masuk ke dalam tahap pemeriksaan pokok perkara untuk kita challenge, kita kontestasi gagasan kita masing-masing bahwa perppu ini tidak hilang objeknya, Yang Mulia, tapi dikaburkan oleh pemerintah, diganti jadi undang-undang. Nanti ketika kami gugat lagi undang-undangnya, bisa jadi dikeluarkan perppu baru, terus dikeluarkan undang-undang baru, sampai kapan ini akan selesai? Begitu, Yang Mulia. Dan itu sangat mengenyampingkan hak dari warga masyarakat Indonesia, Yang Mulia. Jadi, kami mohon kepada Mahkamah sebagai the protector of human rights, melaksanakan fungsi tersebut dan menyidangkan perkara ini sampai selesai, memberikan putusan akhirnya.

7. KETUA: ANWAR USMAN [06:19]

Jadi, terus, gitu ya? Tidak mencabut, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023: M RAZIV BAROKAH [06:21]

Ya, Yang Mulia. Kami meneruskan perkara ini, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [06:23]

Ya. Kemudian, untuk Perkara 22?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023: SAHAT BUTAR BUTAR [06:31]

Ya. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 22, tetap lanjut sampai ada putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [06:42]

Ya, baik.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:49]

Ya, terima kasih. Tadi kami sudah menanyakan, ya, ke ... kalau yang Pemohon Nomor 6 sudah mencabut dan ... dan tadi dikonfirmasi pencabutan itu, dan yang lain tetap meneruskan, tapi nanti bagaimana meneruskannya itu tergantung dari Mahkamah, ya. Nanti Mahkamah yang akan memutuskannya terkait dengan tiga permohonan yang lain. Kami sengaja membentangkan ini, siapa tahu di antara Pemohon punya sikap yang mirip dengan Nomor 6, gitu. Tapi kalau punya sikap yang berbeda, menunggu kami, kami akan putusan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, itu saja.

Nomor 6 ya, dikonfirmasi, ya, pencabutannya, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SAUT PANGARIBUAN [07:48]

Ya, kami sudah ... Nomor 6 dari KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, telah mencabut permohonan kami.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:57]

Oke, terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [08:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 5, ada bukti dari Kuasa Presiden, yaitu PK-5 sampai dengan PK-15. Ya, benar ya? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau begitu. Jadi, untuk Perkara Nomor 14 dan Nomor 22, nanti untuk agenda sidang selanjutnya atau jadwal sidang selanjutnya akan dikirim pemberitahuan melalui Kepaniteraan, ya, termasuk Nomor 5 nanti. Jadi, baik, setelah sidang ini ditutup, Majelis akan mengadakan RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Para Pemohon. Untuk itu sekali lagi, apa hasilnya nanti akan diberi tahu melalui surat oleh Kepaniteraan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB

Jakarta, 6 April 2023

Panitera,

Muhidin

